

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad 2008. Menguak Tabir Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arrasjid ,Chainur.2000.Dasar-dasar Ilmu Hukum.Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly.2009.Menuju Negara Hukum Yang Demokratis.Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Anton F.S.2004.Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana.Bandung: Refika Aditama.
- Anwar, Yesmil.2009. Sistem Peradilan Pidana, konsep, komponen dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia. Bandung : Widya Padjadjaran.
- Effendi ,Masyhur.2005.Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HANKAM).Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fadjar Mukti & Yulianto Achmad.2009.Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah , Andi.2017.Hukum Acara Pidana Indonesia.Jakarta: Sinar Grafika.
- Harjono.2008.Konstitusi sebagai Rumah Bangsa.Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Harahap, Yahya.2008.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.Jakarta: Sinar Grafika.
- _____.2000.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (pemeriksaan sidang, banding, dan kasasi).Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johny.2018.Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.Malang: Banyu Media.

- Luhut M.P.2013.Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan.Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Muladi.2005.Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat.Bandung: Refika Aditama.
- Mujahidin ,Ahmad.2007.Peradilan Satu Atap di Indonesia.Bandung: Refika Aditama.
- Nasution, Bahder Johan.2011.Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia.Bandung: Mandar Maju.
- Nico Ngani & I Nyoman Budi Jaya. 2010. Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, Hibnu.2011.Bunga Rampai Penegekan Hukum Di Indonesia. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahardjo ,Satjipto.2000.Ilmu Hukum.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rivai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rukmini ,Mien.2007.Perlindungan HAM melalui asas praduga tak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.Bandung: Alumni.
- Sumantri ,Sri.1992.Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia.Bandung: Alumni.
- Salam, Moch. Faisal.2001.Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek.Bandung: Mandar Maju.
- Simanjuntak, Nikolas.2009.Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum.Bogor:Ghalia Indonesia.
- Sasangka ,Hari.2007.Penyidikan Penahanan Penuntutan Dan Praperadilan.Bandung: CV.Mandar Maju.
- Tumpa, Harifin A.2010.Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia.Jakarta: Kencana.
- Utsman ,Sabian.2008.Menuju Penegakan Hukum Responsif.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zulkarnain.2013.Praktik Peradilan Pidana.Malang: Setara Press.

Tesis/Jurnal/Artikel

Afandi ,Fachrizal.“perbandingan Praktek Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia”. 2016.Jurnal Mimbar Hukum. Hal.96. 16(1).

Amdani ,Yusi.”Implikasi Penafsiran Undang-Undang, oleh Hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. 2015.Jurnal mimbar Hukum. Hal.461-452. 27(3).

Bahrn.“Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”. 2017.Syariah : Jurnal ilmu hukum dan pemikiran.Hal.227.17(2) Vol. 17.

Erdianto. “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1, Agustus 2010, Hal. 29

Kurnia, Radhi. “Tinjauan Yuridis Pengajuan Praperadilan Lebih dari Satu Kali Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia”, JOM Fakultas Hukum, Vol IV No. 1, Februari 2017, Hal. 3.

Muntaha.“Pengaturan Praperadilan dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. 2017.Mimbar Hukum.Hal.463.Vol. 29.

Razi, Fachruddin. “Mekanisme Pemenuhan Hak Tersangka Melalui Penetapan Tersangka menjadi Objek Praperadilan”.2016. Jurnal Ilmiah Universitas Batahari,Jambi Vol. 16 No2. 2016, Hal. 76.

Setiono, “Rule of Law (Supremasi Hukum)”. 2004.Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.Hal.3

Supriyanto ,Bambang.“Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia”. 2014.Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial. 2(3).

Wardani, Fety Rahman.“Analisis Terhadap Putusan Praperadilan Oleh Hakim Dalam Penetapan Tersangka Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Indonesia(Studi Kasus Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Komjen Pol Budi Gunawan Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)”. 2016.Tesis, Universitas Tanjungpura, Pontianak.Hal.2.

Wahyuningrum Gendis. "Tinjauan Yuridis Pengajuan Praperadilan Oleh Pihak Ketiga Atas Penghentian Penyidikan atau Penuntutan dalam Perkara Korupsi". 2015. JOM Fakultas Hukum. Hal. 7. II(2).

Yuliartha, I Gede. "Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia". Sebuah Ringkasan Ilmu Hukum Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan objek praperadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan beserta lampirannya.